

Pendidikan Politik Menjelang Pilkada 2024 di SMAS Budi Satrya Medan

Marly Meani Silalahi¹ Windawati Pinem² Gadis Prasiska Sembiring³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}
Email: marlymeani23@gmail.com¹ windawatipinem@unimed.ac.id²

Abstract

This research aims to provide political education to students at SMAS Budi Satrya ahead of the 2024 Regional Elections. The problem in this study is that the political participation of novice voters in elections and regional elections is still low. This is due to the limited knowledge they have about elections/regional elections. Therefore, political education is needed for novice voters to increase their political participation. This political education is expected to increase the political awareness of students to participate in the Regional Election process. Data collection techniques are carried out by interviews and observations. Data validation is carried out by data triangulation. The results of this study show that political education has an impact on the knowledge and interest of students of SMAS Budi Satrya Pilkada.

Keywords: Political Education, 2024 Regional Elections, SMAS Budi Satrya Medan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada siswa-siswi di SMAS Budi Satrya menjelang Pilkada 2024. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu maupun pilkada. Hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki tentang pemilu/pilkada. Sehingga dibutuhkanlah pendidikan politik bagi para pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Pendidikan politik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik para siswa agar berpartisipasi dalam proses Pilkada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik berdampak terhadap pengetahuan dan minat siswa SMAS Budi Satrya Pilkada.

Kata Kunci: Pendidikan politik, Pilkada 2024, SMAS budi satrya medan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sebagai ajang pemilihan pemimpin di tingkat daerah, Pilkada memegang peran vital dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan publik di wilayah yang bersangkutan. Pemimpin yang terpilih melalui proses ini diharapkan mampu mencerminkan aspirasi masyarakat serta mengarahkan daerahnya menuju kemajuan yang berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang sering muncul dalam Pilkada adalah kualitas pemilih itu sendiri. Sering kali, pemilih dihadapkan pada situasi di mana keputusan politik mereka dipengaruhi oleh isu-isu yang kurang sehat seperti politik uang, kampanye hitam, dan berita bohong (hoaks). Hal ini membuat kualitas pemilih menjadi krusial dalam menjaga kemurnian demokrasi. Pemilih pemula, yang mayoritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), menjadi segmen penting dalam proses demokrasi ini. Mereka merupakan kelompok yang baru pertama kali terlibat dalam proses pemilihan dan memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam demokrasi. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pemilih pemula memiliki pemahaman yang cukup mengenai politik, tata kelola pemerintahan, maupun mekanisme Pilkada itu sendiri. Kurangnya pendidikan politik yang komprehensif dapat

mengakibatkan mereka mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif dan keputusan yang tidak rasional. Oleh karena itu, penting untuk memberikan mereka edukasi yang tepat agar mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

SMAS BUDI SATRYA, sebagai salah satu institusi pendidikan di Kota Medan, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendidik siswa-siswinya agar memahami peran dan hak mereka dalam demokrasi. Edukasi politik yang terstruktur di sekolah tidak hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa tentang politik dan pemerintahan, tetapi juga untuk membentuk sikap dan perilaku yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks Pilkada 2024, peran sekolah menjadi sangat strategis dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi pemilih yang memiliki kesadaran politik tinggi, mampu berpikir kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor-faktor negatif yang sering muncul selama masa kampanye. Edukasi politik melalui kurikulum sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti diskusi kelas, simulasi pemilu, sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan kepemimpinan dan kewarganegaraan. Melalui metode ini, siswa akan memiliki kesempatan untuk mendalami konsep-konsep dasar demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi politik yang sehat. Edukasi ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk tidak hanya sekadar menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga menjadi pemilih yang cerdas, kritis terhadap visi dan misi calon, serta mampu mengidentifikasi calon pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk memajukan daerahnya.

Namun, implementasi edukasi politik di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya materi pembelajaran yang terfokus pada pendidikan politik serta minimnya kegiatan yang melibatkan siswa dalam proses politik sering kali menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana edukasi politik dalam konteks Pilkada 2024 dapat diterapkan secara efektif di SMAS BUDI SATRYA. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses edukasi politik, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik di sekolah. Dengan demikian, diharapkan siswa SMAS BUDI SATRYA dapat menjadi pemilih cerdas yang mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi dan berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami peran pendidikan politik dalam membentuk pemilih yang berkualitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi pendidikan lain serta pihak terkait dalam merancang program edukasi politik yang lebih efektif, sehingga dapat mempersiapkan generasi muda yang mampu berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono dalam (Saladin, H., & Damayanti, R. (2019). “metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pelaksanaan edukasi politik di SMAS Budi Satrya. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan siswa, guru, dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung terhadap kegiatan edukasi politik yang dilaksanakan di sekolah. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan mendalam mengenai pemahaman siswa tentang proses Pilkada, serta tantangan yang dihadapidalam implementasi program edukasipolitik. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran politik siswa sebelum dan setelah mengikuti program edukasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dampak dari kegiatan tersebut. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen yang terdiri dari panduan wawancara dan kuesioner yang dirancang khusus untuk menggali informasi terkait

pemahaman siswa tentang politik dan partisipasi mereka dalam Pilkada. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga dapat diidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai efektivitas program edukasi politik yang diterapkan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan pengalaman yang dialami oleh siswa dalam memahami dunia politik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut rangkuman hasil wawancara kepada informan untuk keperluan data penelitian:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang kamu ketahui tentang pilkada?	Banyak siswa memahami bahwa Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan masyarakat sebagai pemilih. Namun, masih ada yang kurang mendalam pemahamannya terkait tahapan Pilkada, peran partai politik, dan prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas.
2.	Menurut kamu, mengapa penting bagi remaja seperti Anda untuk memahami proses Pilkada dan ikut berpartisipasi dalam politik?	Siswa memahami pentingnya partisipasi politik karena keputusan yang mereka buat dalam Pilkada dapat mempengaruhi kebijakan daerah dan masa depan politik. Kesadaran ini meningkat setelah mengikuti edukasi politik di sekolah.
3.	Apakah sekolah telah memberikan informasi atau edukasi tentang Pilkada atau proses pemilu? Jika ya, bagaimana pendapat kamu tentang materi yang disampaikan?	Sekolah telah memberikan edukasi politik melalui diskusi terbuka dan simulasi Pilkada. Siswa menganggap program ini membantu mereka memahami proses politik dan pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada.
4.	Faktor apa yang menurut kamu harus diperhatikan oleh pemilih cerdas saat memilih calon kepala daerah?	Siswa menyadari pentingnya memilih berdasarkan program kerja calon pemimpin serta menghindari pengaruh negatif seperti isu SARA dan hoaks yang sering muncul dalam kampanye.
5.	Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mengedukasi siswa lain tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas?	Siswa mengusulkan agar edukasi dilakukan melalui metode yang lebih interaktif seperti simulasi pemilu, diskusi kelompok, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran politik mereka.

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemahaman siswa tentang proses Pilkada dan demokrasi di SMAS Budi Satrya cukup beragam. Beberapa siswa memahami bahwa Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan masyarakat sebagai pemilih, dan juga siswa memahami konsep dasar demokrasi, seperti hak memilih, kebebasan berpendapat, dan pentingnya pemilu sebagai mekanisme untuk menentukan pemimpin, tingkat pemahaman siswa mengenai proses Pilkada dan prinsip-prinsip demokrasi masih bervariasi, namun banyak yang masih belum memahami secara detail tahapan Pilkada, peran partai politik, serta prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat. Dan juga banyak siswa yang masih bingung dengan teknis proses Pilkada, seperti tahapan pencalonan, peran KPU, serta fungsi partai politik dalam pemilu. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari siswa adalah terkait dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dalam kampanye Pilkada. Mereka ingin memahami bagaimana isu ini mempengaruhi pemilihan dan apakah penggunaan isu SARA dalam kampanye itu sah atau seharusnya dihindari. Dari pertanyaan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun siswa memiliki minat terhadap politik, mereka masih perlu pemahaman lebih dalam terkait hubungan antara Pilkada dan demokrasi serta bagaimana mekanisme politik bekerja di Indonesia.

Edukasi politik yang dilaksanakan di SMAS Budi Satrya terfokus pada diskusi terbuka di dalam kelas, sosialisasi pendidikan politik, dan pelibatan siswa dalam simulasi pemungutan suara. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung tentang proses pemilihan dan meningkatkan kesadaran politik mereka sebagai pemilih pemula. Berdasarkan survei yang dilakukan setelah program edukasi, terjadi peningkatan kesadaran siswa mengenai pentingnya partisipasi politik. Siswa mulai memahami bahwa partisipasi mereka dalam Pilkada dapat mempengaruhi kebijakan daerah dan masa depan politik mereka. Namun, masih ada kekhawatiran di antara beberapa siswa tentang dampak politik, terutama ketika ditanya mengapa sering terjadi demo besar-besaran setelah hasil Pilkada diumumkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa juga tertarik pada dinamika politik pasca-Pilkada dan pentingnya menjaga stabilitas demokrasi. Implementasi program edukasi politik di SMAS Budi Satrya untuk meningkatkan kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dilakukan melalui beberapa metode, seperti: Diskusi kelompok dan simulasi Pilkada yang melibatkan siswa sebagai calon, pemilih, dan penyelenggara. Seminar yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan akademisi untuk membahas pentingnya partisipasi politik serta isu-isu aktual terkait Pilkada 2024. Penyediaan materi pembelajaran tentang sistem politik Indonesia dalam mata pelajaran PPKn. Dengan mengikuti program edukasi ini, sebagian besar siswa menunjukkan peningkatan dalam pemahaman mengenai peran mereka sebagai pemilih pemula, pentingnya tidak terpengaruh oleh isu SARA, dan bagaimana memilih secara bijak berdasarkan program kerja calon pemimpin.

Meskipun pelaksanaan edukasi politik di SMAS Budi Satrya terbilang cukup baik, ada beberapa hambatan yang dihadapi. Pertama, sebagian siswa merasa bahwa topik politik kurang relevan atau membosankan karena minimnya pemahaman awal mereka. Kedua, ada ketakutan atau kekhawatiran di kalangan siswa terkait dampak politik pada kehidupan sosial mereka, terutama ketika mereka menyaksikan demo besar-besaran yang terjadi setelah Pilkada. Ketiga, ada juga tantangan dari segi isu SARA, di mana siswa sering kali merasa bingung tentang bagaimana mereka harus menyikapi kandidat yang mungkin memainkan isu-isu sensitif ini. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam memberikan pemahaman politik yang netral dan inklusif. Minimnya minat sebagian siswa tidak semua siswa memiliki ketertarikan yang sama terhadap isu politik, sehingga perlu ada metode pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan mereka. Pengaruh isu SARA dan berita hoak membuat siswa sering kali terpengaruh oleh informasi yang tersebar di media sosial, terutama isu-isu SARA dan hoaks yang menimbulkan kesalahpahaman mengenai politik. Kurangnya waktu pembelajaran dalam materi tentang Pilkada dan edukasi politik sering kali dianggap tidak terlalu penting dan hanya menjadi topik tambahan, sehingga tidak semua siswa dapat mendalami materi secara menyeluruh. Persepsi negatif terhadap politik membuat beberapa siswa menganggap politik sebagai hal yang korup dan tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga menghambat ketertarikan untuk belajar lebih dalam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMAS Budi Satrya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap isu-isu politik, terutama terkait Pilkada, namun masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk memahami berbagai aspek penting, seperti pengaruh isu SARA dan pentingnya stabilitas demokrasi. Dengan adanya pertanyaan tentang demo besar-besaran, siswa menunjukkan ketertarikan terhadap fenomena sosial-politik, namun mereka juga memerlukan bimbingan dalam memahami konteks di balik protes politik, termasuk ketidakpuasan publik terhadap sistem yang ada, yang seringkali menjadi penyebab demo besar. Edukasi politik yang lebih partisipatif, misalnya melalui simulasi atau debat, dapat meningkatkan pemahaman siswa dan menjadikan mereka pemilih yang lebih cerdas dan kritis.

Pembahasan

Pemahaman Siswa SMAS Budi Satrya tentang Proses Pilkada dan Demokrasi di Indonesia

Hak warga negara untuk turut dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik. Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak untuk ambil bagian di dalam pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas". Pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di Indonesia salah satunya diimplementasikan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 43 menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Fenomena dalam perpolitikan ini baru mencuat dengan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Berarti prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atau tidak langsung diatur dengan undang-undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik (Pratikno, 2005). Baik Smith, Dahl, maupun Mawhood mengatakan bahwa untuk mewujudkan apa yang disebut: local accountability, political equity, and local responsiveness, yang merupakan tujuan desentralisasi, di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya adalah pemerintah daerah harus (1) memiliki teritorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); (2) memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income); (3) memiliki lembaga perwakilan rakyat (local representative body) yang berfungsi untuk mengontrol eksekutif daerah; dan (4) adanya kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilu (Syarif Hidayat, 2000).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Implementasi sebagai demokrasi, wujud pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai berkelanjutan, partisipasi yaitu dan demokrasi yang mengembangkan responsivitas akuntabilitas secara menyeluruh. Syarat-syarat tersebut meliputi (1) berusia minimal 17 tahun, (2) sudah pernah menikah, (3) tidak lagi menjadi anggota aktif TNI atau Kepolisian, dan (4) hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan. (UU No. 7 tahun 2017) Setelah runtuhnya era Orde Baru, Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi yang mengalami perubahan secara luas.

Sebagai suatu proses kegiatan, pilkada terdiri dari beberapa tahap. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pilkada dilaksanakan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan meliputi: perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panwas Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih. Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi : pendaftaran bakal

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; Uji Publik; pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; pelaksanaan Kampanye; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara hasil penghitungan dan rekapitulasi suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Proses penyelenggaraan pilkada serentak memang lebih berkualitas, tetapi hasilnya tidak menjamin bagi terbentuknya pemerintahan efek tif. Bisa dipastikan, hampir semua kepala daerah yang dihasilkan pilkada serentak tetap berupa pemerintahan daerah terbelah, di mana kepala daerah terpilih bukan berasal dari partai atau koalisi partai yang mencalonkan kepala daerah terpilih tersebut. Lebih rumit lagi, fragmentasi politik di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sangat tinggi, sehingga tidak mudah bagi gubernur dan wakil gubernur serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota untuk mengambil kebijakan. Jika pun akhirnya disetujui bersama kepala daerah dan DPRD, kebijakan tersebut sudah terdistorsi oleh transaksi politik. (Pratama dan Ma Harddika, 2016: 71-72). Bahwasanya pemahaman siswa di SMAS Budi Satrya mengenai proses Pilkada dan prinsip-prinsip demokrasi memiliki tingkat keragaman yang cukup signifikan. Secara umum, sebagian siswa memahami bahwa Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih, serta mereka juga memahami beberapa konsep dasar demokrasi seperti hak memilih, kebebasan berpendapat, dan pentingnya pemilu sebagai mekanisme penentuan pemimpin. Namun, hasil temuan juga mengungkap bahwa pemahaman siswa tentang detail tahapan Pilkada, peran partai politik, serta prinsip-prinsip penting demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat, masih kurang mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap aspek-aspek mendasar dari Pilkada dan demokrasi agar tercapai partisipasi politik yang lebih efektif dan berkualitas.

Pelaksanaan Edukasi Politik Terkait Pilkada 2024 di SMAS Budi Satrya Dapat Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa sebagai Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan bagian penting pada perhelatan Pemilu 2024, yang bakal dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilih di Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi Z (Gen Z) dan milenial. Indonesia akan menggelar hajatan pemilu yang menentukan nasib bangsa untuk lima tahun ke depan. Mulai dari menentukan calon legislatif, kepala daerah, hingga presiden. Dalam era demokrasi yang semakin matang, partisipasi pemilih pemula menjadi elemen kunci dalam memastikan proses pemilihan yang adil dan mewakili seluruh spektrum masyarakat. Berkaitan dengan bursa pemilih, survei Centre for Strategic and International Studies merilis laporan bahwa pemilih pemula dan pemilih yang tergabung dalam kelompok generasi milenial dan generasi Z (17-34 tahun) akan mendominasi pemilu 2024 yakni sebesar 60%. Bila dikonversi jumlah pemilih muda pada Pemilu 2024 bisa mendekati 114 juta orang. Berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 211.423 pemilih (Kantor Berita Antara, 2023). Berdasarkan data DPT tersebut, jumlah pemilih pemula lebih dari 12.000 pemilih yang saat ini duduk di kelas X, XI dan XII Sekolah Menengah Atas (Kantor Berita Antara, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku sekolah menjadi subjek penting dalam peningkatan kesadaran politik karena mereka mempunyai peran strategis pada pemilihan

umum. Alasan-alasan yang mendasari hal tersebut, adalah pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap periode pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi. Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali. Pemilih pemula yang sebagian besar adalah para pemuda adalah kaum yang sulit didikte (Fernando et al., 2023). Pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai, hanya cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih juga belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih, sehingga terkadang apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, Peningkatan kesadaran politik melalui Sosialisasi Pemilu yang dilaksanakan di SMAS BUDI SATRYA berkaitan dengan literasi digital yang diharapkan bisa menjadi strategi alternatif dalam mendorong peningkatan kesadaran politik dan literasi politik yang menguatkan kesiapan para pemilih pemula di kota Medan untuk menghadapi berbagai resiko dalam pemilu. Melalui sosialisasi ini, para pemilih pemula di SMAS BUDI SATRYA yang well-informed dan well-educated memiliki kesadaran politik yang tinggi sehingga bisa turut berkontribusi mewujudkan demokrasi bangsa yang kuat tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Hambatan yang di hadapi dalam Memberikan Edukasi Politik Kepada Siswa SMAS Budi Satrya Terkait Pilkada 2024

Dalam memberikan edukasi politik kepada siswa SMAS Budi Satrya terkait Pilkada 2024, beberapa hambatan yang mungkin dihadapi meliputi:

1. Kurangnya minat siswa terhadap politik yang dimana banyak siswa yang menganggap politik sebagai sesuatu yang membosankan atau tidak relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka kurang tertarik untuk terlibat dalam diskusi politik.
2. Pengaruh lingkungan dan media sosial yang dimana siswa dapat terpapar pada berita dan opini yang bias atau salah informasi melalui media sosial, yang dapat memengaruhi cara mereka memahami politik dan Pilkada.
3. Pemahaman yang terbatas tentang proses politik yang dimana siswa mungkin kurang memahami bagaimana sistem politik dan Pilkada bekerja, serta pentingnya partisipasi mereka sebagai pemilih di masa depan.
4. Ketakutan akan dampak negatif politik terhadap keamanan yang dimana siswa yang menyaksikan demo besar-besaran yang kadang disertai kerusuhan atau bentrokan bisa merasa takut bahwa keterlibatan dalam politik dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan pribadi mereka. Kekhawatiran ini bisa menghambat antusiasme mereka dalam memahami dan terlibat dalam proses politik.

KESIMPULAN

Pendidikan pemilih bertujuan untuk membentuk pemilih yang rasional dan kritis, terutama di kalangan pemilih muda yang berpotensi besar dalam menentukan arah politik bangsa. Pendidikan ini mencakup pengetahuan teknis tentang pemilu serta nilai-nilai demokrasi. John Dewey menekankan pentingnya partisipasi aktif dan pembelajaran kritis dalam pendidikan demokrasi. Tantangan yang dihadapi pemilih muda, seperti politik uang, memerlukan keterlibatan akademisi, pemerintah, dan media dalam mengedukasi pemilih secara berkelanjutan. Kolaborasi antar pihak penting untuk memastikan keberhasilan program pendidikan pemilih ini, terutama menjelang Pemilu 2024. Dari hasil wawancara dan observasi,

diketahui bahwa pemahaman siswa SMAS Budi Satrya mengenai Pilkada dan demokrasi cukup beragam. Beberapa siswa memahami Pilkada sebagai proses pemilihan kepala daerah yang melibatkan masyarakat, serta konsep dasar demokrasi seperti hak memilih dan kebebasan berpendapat. Namun, masih banyak siswa yang kurang memahami detail proses Pilkada, seperti peran partai politik dan tahapan pemilu, serta prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas. Mereka juga bingung tentang teknis Pilkada dan sering bertanya tentang isu SARA yang muncul dalam kampanye politik.

Program edukasi politik di SMAS Budi Satrya mencakup diskusi terbuka, sosialisasi politik, dan simulasi pemilu. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa sebagai pemilih pemula dan memberikan pengalaman langsung tentang proses politik. Setelah program berjalan, survei menunjukkan peningkatan kesadaran siswa tentang pentingnya partisipasi politik. Siswa mulai memahami bahwa pilihan mereka dalam Pilkada dapat berdampak pada kebijakan daerah. Namun, ada beberapa siswa yang masih khawatir tentang dampak politik, terutama mengenai demo pasca-Pilkada, yang menunjukkan minat mereka terhadap dinamika politik. Meskipun program edukasi politik berjalan cukup baik, ada beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa siswa merasa topik politik kurang menarik atau relevan, terutama karena kurangnya pemahaman awal. Selain itu, mereka juga khawatir dengan dampak politik terhadap kehidupan sosial, khususnya karena seringnya terjadi demo pasca-Pilkada. Tantangan lainnya adalah kebingungan siswa dalam menyikapi isu SARA yang sering muncul dalam kampanye politik, yang menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang lebih inklusif.

Selain itu, minat siswa terhadap politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti isu SARA dan hoaks yang tersebar di media sosial, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kurangnya waktu untuk membahas Pilkada dalam pembelajaran PPKn juga menjadi masalah, karena banyak siswa yang tidak dapat mendalami materi secara menyeluruh. Persepsi negatif terhadap politik, di mana sebagian siswa menganggap politik sebagai hal yang korup, juga menjadi penghambat dalam meningkatkan minat mereka terhadap politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SMAS Budi Satrya memiliki ketertarikan terhadap isu politik, terutama Pilkada, namun masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Mereka perlu memahami pengaruh isu SARA, stabilitas demokrasi, dan fenomena sosial-politik seperti demo pasca-Pilkada. Pendekatan edukasi yang lebih interaktif, seperti simulasi dan debat, diharapkan dapat membantu siswa menjadi pemilih yang lebih kritis dan cerdas dalam menghadapi dinamika politik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fernandes, E. Gani, and S. N. Okthariza, "Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif," Jakarta, 2023.
- A. Primadi, D. Efendi, and S. Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *Journal of Political Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 63–73, Jul. 2019, doi: 10.33019/jpi.v1i1.7.
- A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M.D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63.
- Anwari, H. (2023). *Pemikiran Pendidikan dan Demokrasi ala John Dewey*. Diakses dari: <https://sabili.id/pemikiran-pendidikan-dan-demokrasi-ala-john-dewey/>
- Fitriyah, F. (2013). *Meninjau Ulang Sistem Pilkada Langsung: Masukan Untuk Pilkada Langsung Berkualitas*.
- Hambali, H., Hariyanti, H., & Eddison, A. (2021). The model of voter education of women-based democracy volunteers. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 48-60.
- Hasan, Ahmad. (2023). Strategi Mendidik Pemilih Milenial Cerdas pada Pemilihan Umum 2024 (15-22)

- M. Elman Sidni Almntasor, M. Irfan Faqih, A. S. Shohibul Hasyim, and A. Wahyudi, "Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Kedepan," *Prosiding Seminar Hi-Tech*, vol. 1, no. 1, pp. 14–15, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- M. Wance and B. La Suhu, "Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada," *Joutnal Of Government -JOG*, vol. 4, no. 2, pp. 91–115, 2019
- Mulyatno, C. B. (2011). *Demokrasi Sebagai Pola Hidup Menurut John Dewey*. *Diskursus-Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 10(1), 1-29.
- N. Mangngasing, D. Haryono, and N. Indriani, "Sosialisasi Peningkatan Keterlibatan Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Sarjo," *Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 2, 2023, [Online]. Available: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIKEMAS>
- Nurdin, M., & Insan, K. (2020). Pendidikan Demokrasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (Studi Pada Pemilihan Ketua Osis Di Sma Negeri 1 Sinjai). *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 32-51.
- Permady, G. C. (2023). Pendidikan Pemilih Untuk Pemilih Pemula Melalui Pembelajaran Ppkn Di Persekolahan. *Bhineka Tunggal Ika; Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 10(2), 160-168.
- R. Sri Utami, T. Br Ginting, and J. Wilson Tambunan, "Publikasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pundimaswid)," *Publikasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pundimaswid)*, vol. 2, no. 1, pp. 2963–7848, 2023, doi: 10.54593/pundimaswid.v2i1.177.
- Suyato, S., & Arpanudin, I. (2022). Tafsir atas buku "Democracy and Education" karya John Dewey oleh pendukung demokrasi. *FOUNDASIA*, 13(1), 40-48.
- Y. M. Huljanna and Ikhsan, "Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan," *INDEPENDET : Jurnal Politik Indonesia dan Global*, vol. 3, no. 2, pp. 1–12, 2022.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millennial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024
- Yustiningrum, "Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu2014," *Jurnal Penelitian Politik*, 2015.